



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 700/VIII/2011

II/November 2011



Kunjungan Kerja Komisi DPR RI Ke Berbagai Daerah



HARAPAN DAN TANTANGAN KEPEMIMPINAN DPR SEBAGAI PRESIDEN PUIC

Sebagaimana diketahui, Ketua DPR-RI telah terpilih sebagai Presiden *Parliamentary Union of OIC Member States* (PUIC) untuk periode 2012-2014. Dalam posisi ini, tentu saja banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan harapan PUIC sebagai lembaga yang kredibel dalam menyuarakan kepentingan negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam). Berikut ini beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan, berkaitan dengan visi dan misi DPR sebagai Presiden PUIC, sekaligus menyambut penyelenggaraan *The 7th Session of The Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and Related Meetings, 24-31 January 2012, di Palembang.*

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Parliamentary Union of the OIC Member States, atau organisasi parlemen dari negara OKI. PUIC didirikan pada tanggal 17 Juni 1999 dan ber Kantor pusat di Teheran, Republik Islam Iran. Saat ini PUIC memiliki anggota sebanyak 51 parlemen yang merupakan Negara-negara anggota OKI dan juga memiliki 18 peninjau yang merupakan regional/internasional organizations atau parlemen. Statuta PUIC menegaskan bahwa organisasi ini didirikan tidak hanya untuk penguatan kontak, kerjasama dan dialog antara parlemen negara-negara anggota OKI dan wakil-wakilnya, namun juga untuk memperkenalkan ajaran luhur Islam dan berusaha untuk menyebarkannya dengan tetap menekankan sisi humanisme dari peradaban Islam. PUIC didirikan demi membina koordinasi antara bangsa-bangsa di dunia dalam rangka untuk menghormati dan membela hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian berdasarkan keadilan.

Pada bulan Januari 2012 yang akan datang, seiring dengan jabatan Ketua DPR-RI sebagai Prsiden PUIC, DPR-RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *The Seventh Session PUIC Conference and Its Related Meetings*. Acara ini merupakan momen penting bagi DPR-RI, untuk menularkan *best practices* Indonesia dalam hal menjalankan demokrasi



dan nilai-nilai Islam yang dianut oleh kebanyakan penduduk Indonesia, selain menyikapi perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

DPR-RI sebagai Presiden PUIC diharapkan dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam menularkan berbagai pengalaman yang dimilikinya. Kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta damai, membuktikan bahwa Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan seperti banyak diungkapkan oleh banyak pihak. Pengalaman inilah yang antara lain perlu ditularkan kepada negara-negara anggota PUIC, agar lebih baik dalam menjalankan demokrasi di negerinya.

Sebagaimana diketahui, beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah, kini tengah mengalami “musim semi di Arab” (Arab Spring), yang menuntut diterapkannya sistem demokrasi dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dijalankan di negara mereka. Tercatat, beberapa negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Yaman, dan beberapa negara lain, tengah menghadapi tantangan dalam upaya melakukan transformasi kearah demokratisasi di negerinya. Tantangan terhadap proses transformasi ini memang harus dijawab, bukan hanya oleh

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah saja, namun juga di negara mayoritas berpenduduk muslim lainnya, sehingga tujuan terhadap tercapainya kesejahteraan rakyat tidak harus terjebak pada pertentangan antara Islam dan demokrasi. Sebab, amat disayangkan apabila proses transformasi kearah demokratisasi ini harus menelan puluhan bahkan ratusan korban nyawa, akibat arogansi kekuasaan yang tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyatnya sendiri.

Dengan demikian, sebagai Presiden PUIC mendatang, saya berharap bahwa proses transformasi kearah demokratisasi yang kini sedang melanda di beberapa negara yang juga menjadi negara anggota PUIC ini, bisa berlangsung damai. Sehingga tidak justru memperluas konflik dan melupakan tujuan utama, antara lain dalam memperjuangkan kemerdekaan penuh negara Palestina.

Kerjasama dan Misi PUIC

PUIC adalah organisasi yang besar, yang diharapkan mampu membangkitkan solidaritas dan kerjasama antar-negara anggotanya. Dalam hal ini, DPR-RI sebagai Presiden PUIC, memiliki kesempatan cukup besar untuk menyuarakan kebijakan luar negeri dan kepentingannya. Indonesia dapat mendorong peningkatan kinerja negara-negara anggota OKI di tengah-tengah tantangan global saat ini, karena parlemen negara-negara anggota OKI merupakan satu kekuatan signifikan yang dapat mendorong negara-negara OKI memiliki posisi tawar yang kuat terhadap negara Barat. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengupayakan peningkatan citra OKI sebagai organisasi yang cukup menarik dan disegani oleh masyarakat internasional. PUIC perlu menitikberatkan pada peran parlemen dalam menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial di negara Muslim, termasuk Islamofobia serta hubungan dengan budaya lain. Sebab, dalam banyak pandangan Barat, Islam dengan ajaran dan nilai-nilainya, telah menjadi "sasaran" yang dicampur-adukkan dengan paham terorisme.

Selain itu, Indonesia juga dapat menghadirkan gagasan bagaimana peran PUIC dalam memperhatikan, tidak hanya terbatas terhadap negara-negara muslim, tetapi juga terhadap negara yang memiliki penduduk minoritas muslim. Isu-isu mengenai Islam tidak hanya berpusat di Timur Tengah, tetapi juga melebar ke negara-negara lainnya termasuk muslim minoritas di negara-negara Eropa, dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan, bagaimana sulitnya negara-negara muslim berhadapan dengan Barat, jika masalah antar-negara muslim sendiri tidak mudah diselesaikan. Dengan demikian, kehadiran PUIC harus mampu memperlebar kerjasama, bukan hanya kerjasama politik sebagaimana tujuan awal terbentuknya OKI tahun 1969, tetapi OKI harus mampu menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, bu-



daya dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia. Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI dan PUIC harus memandang bahwa revitalisasi dan perluasan kerjasama OKI sebagai permasalahan mendesak.

Untuk menjawab berbagai tantangan, misi PUIC yang dirumuskan dari tujuan PUIC, harus dijadikan pijakan kerja Indonesia sebagai Presiden PUIC periode 2012-2014. Misi ini harus diwujudkan dalam rangka revitalisasi dan perluasan kerjasama antar-negara anggota PUIC. Yaitu: *pertama*, mendorong organisasi Parlemen negara-negara anggota OKI ini menjadi organisasi parlemen yang diperhitungkan di kancah internasional khususnya dalam kaitan dengan permasalahan umat Islam, dan keberadaan PUIC dirasakan manfaatnya oleh anggotanya. *Kedua*, mendorong partisipasi aktif parlemen yang telah tergabung dalam PUIC untuk aktif menghadiri dan berkontribusi dalam setiap sidang PUIC. *Ketiga*, mendorong parlemen-parlemen anggota PUIC untuk melaksanakan butir-butir yang telah disepakati dalam Resolusi dan Deklarasi PUIC. *Keempat*, mendorong parlemen dari negara anggota OKI yang belum menjadi anggota PUIC (Komoro, Maladewa, Brunei, Nigeria, Uzbekistan dan Suriname) untuk dapat menjadi anggota dan aktif di PUIC. *Kelima*, menjadikan PUIC menjadi organisasi yang lebih inklusif dengan mengajak parlemen-parlemen yang di negara terdapat komunitas warga muslim (seperti Rusia, China, Filipina, Thailand, dan India) untuk menjadi observer di PUIC. *Keenam*, mendorong agar PUIC yang selama ini PUIC yang pusat perhatiannya selama ini adalah masalah-masalah di Timur Tengah dan Afrika agar juga menaruh perhatian serius atas masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Asia dan belahan dunia lainnya. Dan *ketujuh*, mendorong penguatan Sekretariat PUIC agar dapat secara optimal mendukung dinamika PUIC.

Oleh karenanya, penting bagi DPR-RI untuk mensosialisasikan secara optimal *The Seventh Session PUIC Conference and Its Related Meetings* yang akan berlangsung di Palembang Januari 2012. Sekaligus sebagai dukungan kepada Pemerintah dalam hal kebijakan politik luar negeri.*

Komisi VII DPR Siap Bantu Maluku

Perjuangan Pemerintah Provinsi Maluku, baik eksekutif maupun legislatif untuk mendapatkan Participation Interest (PI) 10 persen terkait dengan pengelolaan Blok Migas Abadi Masela hingga saat ini belum juga menunjukkan titik temu.



Anggota Komisi VII DPR RI, Milton Pakpahan

Bahkan upaya untuk mendapatkan hak tersebut terancam hilang, dengan munculnya klaim dari Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PT. Pertamina yang ingin mendapatkan PI tersebut.

“Saya memberi apresiasi yang positif kepada pemerintah provinsi dan rakyat Maluku yang begitu gigih untuk memperjuangkan PI tersebut. Oleh karena itu saya selaku anggota Komisi VII DPR bersama teman-teman yang hadir disini, siap membantu untuk memperjuangkan hal tersebut kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM,” ujar Milton Pakpahan saat berdialog dengan Gubernur Provinsi Maluku, Karel Albert Ralaha beserta jajarannya, di kantor gubernuran Maluku, Senin (31/10).

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat,

Milton mengatakan, masalah yang saat ini muncul terkait dengan pengelolaan Blok Migas Masela yakni klaim mengklaim batas wilayah Blok Masela. “Saya kira permasalahan yang terjadi saat ini adalah klaim mengklaim batas wilayah yang dipersoalkan oleh Provinsi Maluku dan Provinsi NTT. Maka Komisi VII DPR dalam hal ini siap membantu pemerintah provinsi dan rakyat Maluku untuk mendapatkan 10 persen tersebut,” jelasnya. Apalagi sampai saat ini PI 10 persen belum ditandatangani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tambahnya.

Menurut Milton, Blok Masela yang memiliki kandungan Migas yang cukup besar memiliki persoalan yang sangat unik. Masalah ini cukup unik, kata Milton. Untuk itu, lanjutnya, kita akan

mendorong hal ini untuk dibicarakan dengan Kementerian ESDM, sehingga masalah pengelolaan PI 10 persen Blok Masela dapat terselesaikan, tuturnya.

Syamsul Bachri anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar juga memberi dukungannya yang sama terkait dengan masalah Blok Masela ini. “Komisi VII setelah kembali ke Jakarta akan mengundang Kementerian ESDM untuk meminta penjelasan terkait dengan belum ditandatanganinya PI 10 persen tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku, Karel Albert Ralaha dalam pertemuan itu mengakui, bahwa hingga saat ini pemerintah pusat belum memastikan siapa yang akan mengelola PI 10 persen Blok Migas Masela. “Jadi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku saat ini adalah belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait dengan siapa yang memiliki hak mengelola Blok Masela,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai dengan undang-undang, Blok Masela masuk dalam wilayah Republik Indonesia yang ada di Provinsi Maluku. Karena masuk dalam wilayah Provinsi Maluku sehingga sebagai wilayah penghasil, maka Provinsi Maluku berhak mendapatkan PI 10 persen itu, himbuhnya.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Melky L. Frans, menambahkan hak pengelolaan PI itu adalah hak daerah penghasil. Karena berada dalam Provinsi Maluku maka dia bagian dari kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang, dan tidak ada alasan untuk secepatnya Kementerian ESDM menerbitkan itu kepada provinsi sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai ibu atas daerah ini, kata Melky.

Dia berharap dengan kehadiran Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku kiranya dapat membantu daerah Maluku dan mendorong agar Kementerian ESDM yang baru ini dapat mempercepat SK-nya.

“Kami sebagai wakil rakyat Maluku tidak mau mengecewakan hati rakyat Maluku, untuk itu kami minta kepada Komisi VII DPR untuk ikut berpartisipasi memperjuangkannya,” pintanya. (iw)/foto:iw/parle.

Komisi X DPR Pertanyakan Status Profesionalitas Guru

Status profesional yang dimiliki ribuan guru di Sulut, kini mulai dipertanyakan kredibilitasnya. Di Manado, Selasa (1/11) Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto (F-PDIP) secara tegas menyebutkan saat ini kebanyakan guru profesional hanya mengejar tunjangan sertifikasi untuk peningkatan status sosial diri secara pribadi dan bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Pak kadis, bagaimana dengan guru-guru penerima sertifikasi di Sulut? Kami lihat kebanyakan guru-guru sekedar dapat uang dan tidak ada peningkatan kualitas atau etos kerja para guru itu. Kebanyakan hanya mengejar uang saja,” kata Utut di hadapan Plt Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut Drs Star Wowor MSi.

Tidak hanya Utut, sejumlah personil Komisi X lainnya pun ikut menyorot hal yang sama, di antaranya Dedi Gumelar (F-PDIP) dan Harpia (F-PG) meminta pemerintah untuk tegas dengan label profesional yang dimiliki seorang guru. “Tunjangan sertifikasi diberikan untuk meningkatkan kinerja guru dalam memberi pelajaran kepada anak didik di kelas, sekarang bayak guru yang justru semakin malas bekerja atau malah memberi uang kepada guru lain untuk menyelesaikan tugasnya. Semoga di

Sulut, tidak ada guru yang demikian,” kata Dedi.

Selain membahas soal tunjangan sertifikasi guru, rombongan Komisi X yang datang berjumlah 12 orang kemarin juga sempat membahas soal ketersediaan guru di daerah, peningkatan kualitas guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), fasilitas belajar, pengelolaan perpustakaan di daerah, serta pandangan Diknas Sulut terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Seperti diketahui, jumlah guru di Sulut saat ini mencapai 25.691 guru yang terbagi 93 guru SLB, 1.443 guru TK, 14.210 guru SD, 5.914 guru SMP, 2.759 guru SMA dan 1.272 guru SMK. Meski demikian, Sulut masih kekurangan 7210 orang guru, yaitu 72 guru SLB, 723 guru TK, 3.502 guru SD, 1.918 guru SMP, 764 guru SMA, dan 231 guru SMK.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulut Star Wowor menjelaskan hasil pendidikan terhadap Human Development Indeks (HDI), jumlah siswa, kondisi ruang belajar dan kebutuhan sarana pembelajaran di setiap kabupaten/kota, angka sisa melek huruf di Sulut, perkemba-

ngan hasil UN, serta sejumlah permasalahan yang ditemui untuk diteruskan Komisi X ke pemerintah pusat.

“Sejumlah permasalahan yang kami temui seperti terbatasnya fasilitas pembelajaran yang multi media, adanya daerah yang belum dapat mengakses fasilitas pemerintah secara gratis dengan tidak tersedianya fasilitas infrastruktur di daerah, masih belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas profesional, dan lain sebagainya,” jelas Wowor.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi X memberi pujian kepada Wowor atas kelengkapan data yang disiapkan. “Dari sejumlah daerah yang kami kunjungi, data paling lengkap ada di Sulut. Dan terima kasih atas kesiapannya,” puji Utut.

Sebelumnya Komisi X sempat melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah di antaranya PAUD di kleak, SMP 7 Manado, SMAN 8 Manado, dan SMA Kr YPKM Manado. “Kami minta Diknas Sulut terbuka mengenai hal-hal apa saja yang perlu kurang dan perlu diperbaiki sehingga kami dapat memperjuangkannya di pusat,” harap Utut.(nt)foto:nt



Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sulut.

Instrumen dan Infrastruktur Hukum Harus Ditegakkan di Provinsi Banten

Tim Kunker tiba di Serang, diterima Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Pendopo Gubernur Banten pada Senin (31/11). Wakil Ketua Komisi III DPR RI selaku Ketua Tim, Tjatur Sapto Edy dalam pertemuan dengan Gubernur dan instansi terkait, menyampaikan bahwa Komisi III dalam kunjungannya ingin melihat secara langsung percepatan pembangunan Provinsi Banten terkait keamanan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menyerap aspirasi dari daerah yang resmi berdiri sejak tahun 2000 tersebut.



Tim Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten dan diterima oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah

“Saat ini kami sedang menyusun UU yang berkaitan dengan penegakan hukum, oleh karena itu melalui kunjungan kerja ini kami berharap mendapatkan banyak masukan guna menyempurnakan UU tersebut” ungkap Tjatur.

Provinsi Banten yang baru saja usai mengadakan perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) mendapat ucapan selamat atas penyelenggaraannya yang dinilai aman dan kondusif. Mengenai adanya gugatan ke Mahkamah Kontitusi oleh pasangan Calon yang tidak puas, menurut Tjatur merupakan bagian dari instrumen hukum yang harus dilalui.

Senada dengan Tjatur, anggota Komisi III, Ahmad Yani, mengatakan,

pengawasan proses persidangan gugatan hukum Pemilukada Banten di MK perlu dilakukan agar prosesnya tidak keluar dari jalur hukum. “Jika memang ada gugatan dan persidangan di MK (Mahkamah Konstitusi), kami yakin MK bisa memberikan keputusan yang adil, arif, dan bijaksana,” kata Ahmad Yani.

Yani berharap tidak terjadi konflik pasca Pemilukada Banten. “Putusan MK nanti diharapkan memberi kepastian hukum dan tidak membuat masyarakat semakin resah,” kata Yani. Proses peradilan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari proses demokrasi, instrumen yang harus dijalankan daripada konflik yang berkepanjangan.

Selanjutnya tim Kunker melakukan pertemuan dengan Kanwil Kemenkum

HAM Banten. Pembangunan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) menjadi salahsatu sorotan karena Banten adalah daerah strategis nasional. Berbagai fasilitas skala nasional dan internasional ada di dalam wilayahnya, dengan perputaran uang sekitar Rp170 triliun setiap tahun menjadikannya berpotensi terhadap tindakan pelanggaran hukum. Salah satunya kemungkinan masuknya imigran gelap ke Banten sehingga perlu ada perbaikan infrastruktur hukumnya.

“Saya kira Rudenim yang berada di bawah Kanwil Kemenkum HAM dibutuhkan juga di Banten. Kami Komisi III siap untuk mendorong itu jika ada usulan untuk dibangun di Banten,” kata Tjatur. (ry) foto:ry/parle

Pembangunan Sport Center Perlu Diikuti Pemeliharaan Yang Baik

Demikian disampaikan Nyoman saat Komisi X DPR mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan dan jajarannya, Senin (31/11) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur.

Nyoman mengatakan, Komisi X DPR sering memperjuangkan anggaran pembangunan sport center di beberapa daerah, namun sayangnya tidak ada biaya pemeliharaan dari pemerintah setempat. Sehingga, katanya, gelanggang olah raga tersebut tidak terawat dengan baik, bahkan baru tiga tahun sudah rusak.

Tentunya hal ini sangat disayangkan, dana yang begitu besar untuk pembangunan gelanggang olah raga tersebut tanpa diiringi keinginan kuat untuk memelihara dengan baik.

Pernyataan Nyoman tersebut terkait dengan keinginan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan untuk memiliki Sport Center yang bertaraf Nasional.

Pemda setempat mengusulkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pu-

Anggota Komisi X DPR Nyoman Dhamantra mengingatkan, keinginan beberapa daerah untuk memiliki Sport Center Nasional harus disertai juga dengan pemeliharaan yang baik, sehingga Gelanggang Olah Raga yang dibangun tersebut tidak sia-sia.

sat untuk pembangunan Sport Center ini mengingat Provinsi Kalsel belum mempunyai kawasan olahraga yang memadai untuk event-event skala nasional.

Tentu saja niat baik ini perlu didukung, agar Provinsi Kalimantan Selatan juga dapat menyelenggarakan event-event Nasional seperti PON dan pertandingan olah raga nasional lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, untuk pembangunan sport center ini, Pemerintah Daerah telah menyediakan lahan seluas 216 Ha yang berlokasi di Kota Banjarbaru. Tahun 2011 ini, katanya, sedang disusun Masterplannya.

Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan, dukungan anggaran ini sangat diharapkan untuk dapat mewu-

judkan impian masyarakat Kalsel memiliki gelanggang olah raga yang memadai.

Rudy menambahkan, untuk bidang olah raga ini ada berbagai kendala yang dihadapi daerahnya, diantaranya adalah dukungan prasarana dan sarana olahraga di daerah masih kurang memadai.

Menurut Rudy, kualitas SDM Olahraga juga masih sangat terbatas khususnya terkait tenaga Pelatih instruktur, guru dan tenaga manajemen olahraga.

Selain itu, pembinaan kelembagaan cabang-cabang olahraga daerah yang masih belum optimal dan masih terbatasnya upaya pembibitan untuk atlet unggulan pelajar berprestasi baik untuk tingkat nasional maupun internasional. (tt)foto:tt



Anggota Komisi X DPR Nyoman Dhamantra

Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan Di Kalsel Diminta Dikaji Lebih Dalam

Komisi X DPR RI meminta Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengkaji lebih dalam perencanaan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sakit Pendidikan.



Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Hamid Wahid

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (31/10) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Asman Abnur.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi X H. Abdul Hamid Wahid mengatakan, pengembangan RSUD menjadi Rumah Sakit Pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pelayanannya saja, tapi sudah dititikberatkan pada disiplin keilmuannya, untuk itu kajian ini perlu dilakukan.

Abdul Hamid menambahkan, jika Pemda Kalsel dapat mewujudkan

RSUD ini menjadi RS Pendidikan, tentunya ini prestasi yang membanggakan.

Senada dengan itu, Itet Tridjati Sumarijanto, mengatakan, perencanaan RS Pendidikan itu harus terlebih dulu dilakukan penelitian dan harus ada informasi data yang lengkap serta dilengkapi dengan SDM khusus.

Terhadap rencana pengembangan RSUD menjadi Rumah Sakit Pendidikan, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin meminta dukungan anggaran untuk Pengembangan RSUD Ulin Banjarmasin menjadi Rumah Sakit Berstandar

Internasional, Rumah Sakit Kelas A Pendidikan, yang sekali-gus menjadi Pusat Rujukan Penyakit Kanker dan Jantung di regional Kalimantan.

Menurut Rudy, total dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan Rumah Sakit Pendidikan tersebut adalah sebesar Rp 288 milyar. Sampai dengan Tahun 2012 dana APBD yang sudah dianggarkan sebesar Rp 14,9 milyar (T.A. 2012 APBD 31 milyar rupiah).

Mengingat besarnya dana yang dibutuhkan, tentunya Pemda Kalsel membutuhkan dukungan dana dari APBN, dan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 242 milyar. Dana tersebut, katanya, untuk keperluan pembangunan fisik (poliklinik dan lain-lain), serta pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran.

Selain itu, Pemda Kalimantan Selatan juga mengharapkan dukungan anggaran untuk penyediaan peralatan kesehatan bagi Pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) di Banjarmasin.

Motivasi dibangunnya RSGM ini menurut Rudy disebabkan Kalsel adalah daerah yang tertinggi kerusakan giginya secara nasional, sehingga diperlukan pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut ini agar generasi yang akan datang kesehatan giginya membaik dibandingkan kondisi sekarang.

Berdasarkan penelitian, masyarakat di Kalsel banyak yang mengalami kerusakan gigi karena salah satu unsur dalam kandungan air di provinsi ini nol, sehingga masyarakat banyak yang mengalami kerusakan gigi.

Guna mewujudkan RSGM itu, total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 102 milyar, terdiri dari Rp 72 milyar untuk bangunan dan Rp 30 milyar untuk alat kesehatannya. Untuk pembangunan fisik RSGM dibiayai dari dana APBD (Tahun 2011 sebesar Rp 32 milyar, dan tahun 2012 Rp 40 milyar). (tt)foto:tt

Komisi VII DPR Nilai Produksi Migas Belum Optimal

Tujuan kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku ini dalam rangka menyerap aspirasi dan mendapatkan informasi tentang perkembangan dan masalah yang dihadapi serta apa yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan-persoalanyang ada di Provinsi Maluku, khususnya terkait dengan bidang tugas Komisi VII.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Komisi VII, Achmad Fariel (F-PP) saat pertemuan dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, di kantor ke gubernuran Maluku, Senin (31/10).

Menurut Fariel, di bidang energi kita masih menghadapi tantangan utama, berupa peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh peningkatan pasokan dan ketersediaan. "Peningkatan produksi pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi belum dapat dilaksanakan dengan optimal,"ujarnya.

Saat ini Komisi VII sedang melaksanakan proses perubahan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kata Fariel seraya menambahkan perubahan dimaksud untuk memperbaiki tatakelola minyak dan gas bumi kita.

Sementara, lanjutnya, di bidang pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Komisi VII telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Minerba yang secara khusus melakukan telaah dan evaluasi tentang pengelolaan pertambangan Minerba dan ketaatannya terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Tentunya hal ini sangat berkaitan erat dan perlu mendapat perhatian, mengingat Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi, dan terdapat juga pertambangan mineral yang cukup besar,"ujarnya.

Terkait dengan sektor ketenagalistrikan, Fariel menjelaskan, bahwa kita juga masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan pasokan yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Terlebih lagi di Provinsi Maluku yang juga masih terdapat masalah pemenuhan kebutuhan listrik. "Padahal provinsi



Ketua Tim Komisi VII DPR, Achmad Fariel (kanan)

ini juga memiliki sumber energi yang dapat dikembangkan," kata Fariel.

Begitu juga dengan bidang lingkungan hidup serta riset dan teknologi (ristek) perlu mendapatkan perhatian yang serius, khususnya terkait dengan kerusakan dan upaya konservasi lingkungan hidup, serta pengembangan riset sebagai upaya untuk peningkatan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki.

Fariel berharap, kunjungan kerja ini dapat mencapai tujuan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan dukungan terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Sementara Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dalam paparannya mengatakan, salah satu potensi minyak dan gas bumi yang saat ini mendapatkan penanganan kamidi Provinsi Maluku adalah Lapangan Abadi Blok Masela yang terletak di Wilayah Kerjapertambangan (WKP) Provinsi Maluku.

Selain potensi gas dan minyak bumi, jelasnya, Provinsi Maluku juga memiliki potensi energi tenaga listrik berupa tenaga panas bumi dan tenaga air. Untuk energi tenaga listrik panas bumi memiliki potensi sebesar 268 Mwe, sedangkan untuk energi listrik tenaga air

memiliki potensi kurang lebih sebesar 191 kilo watt, ujarnya. PT. PLN telah beroperasi di Provinsi Maluku dan telah melaksanakan pemasangan listrik dengan ratio elektrifikasi sekitar 60 persen, tambahnya.

Kendala yang dihadapi PT. PLN saat ini, jelasnya, adalah mengenai penggunaan bahan bakar MFO untuk pembangkit 25 megawatt di Hative Kecil, karena harus dipasok dari Makassar, sedangkan ada terminal Pertamina di Waiame.

Ia berharap adanya dukungan pemerintah pusat melalui Komisi VII DPR untuk membantu terealisasinya upaya-upaya dimaksud.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Provinsi Maluku terdiri atas 15 orang anggota, rombongan tim dipimpin Achmad Fariel (F-PP) dan sejumlah anggota lintas fraksi, Milton Pakpahan, Siti Romlah, I Wayan Gunastra, dan Achmad Syafi'i dari F-PD; Arsyad Juliandi Rachman, Syamsul Bachri, dan Halim Kalla dari F-PG; Daryatmo Mardiyanto, Ismayatun, dan Dewi Aryani Hilman dari F-PDI Perjuangan; Agus Sulistiyono dan Nur Yasin dari F-PKB; Pius Lustrilang dari Fraksi Partai Gerindra; dan M. Ali Kastella dari Fraksi Partai Hanura. (iw)/foto:iw/parle

Komisi X Dorong Dinas Pendidikan Kalsel Perbanyak SMK

Komisi X DPR RI mendorong Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan untuk memperbanyak jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan dengan jumlah SMA. Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR Mahyuddin saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (1/11).



Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin

Mahyuddin mengatakan, sudah saatnya Pemerintah memberikan perhatian yang serius pada sekolah-sekolah yang mendidik siswa untuk siap kerja, dan jawaban semua itu adalah memperbanyak sekolah menengah kejuruan.

Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan juga telah memprogramkan SMK lebih besar jumlahnya dari pada SMA. "Jika dulu SMA jumlahnya lebih besar (60%) sekarang terbalik 60% SMK dan SMA 40%," kata Mahyuddin.

Bahkan Mahyuddin berharap, Kalsel memiliki SMK Plus atau SMK Unggulan, yang nantinya dapat merupakan cikal bakal community college, yang lulusannya dapat gelar Diploma Satu (D1).

Tentunya, kata Mahyuddin, SMK plus yang dikembangkan yang besar dan harus dapat melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Misalnya, di Kalsel ini sangat kaya akan hasil per-

perkebunan, industri. "Potensi inilah yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mendirikan SMK yang sesuai dengan potensi daerahnya, sehingga daerah ini memiliki SDM yang handal di bidangnya," tambahnya.

Mahyuddin menambahkan, ada 10 titik SMK Plus di seluruh Indonesia yang telah mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Ke sepuluh SMK tersebut diantaranya berada di Kalimantan Tengah, Pacitan, Palembang, Bali, Probolinggo, Sulawesi Selatan, Jepara, Solo.

Dia berharap, Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel dapat lebih pro aktif mengusulkan daerahnya untuk diajukan menjadi SMK Plus, sehingga Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran.

Menanggapi perbandingan SMK dan SMA, pada paparan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin mengatakan, Pemerintah Daerahnya telah memberikan perhatian

lebih pada SMK dengan persentase sesuai yang telah diprogramkan Pusat yaitu 60 persen SMK dan 40 persen SMA. "Saya akan terus meningkatkan keberadaan SMK ini di Kalsel," kata Rudy.

Rudy menambahkan, untuk saat ini keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan memang sangat diperlukan untuk mendidik siswa yang siap kerja di bidangnya.

Untuk mendukung SMK di daerahnya, Rudy mengusulkan pengembangan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP Pelaihari) di Kalimantan Selatan. Sekolah ini, saat ini dikelola oleh Pemprov. Kalsel untuk memenuhi tenaga teknis lapangan dibidang pertanian, khususnya Penyuluhan Pertanian dalam arti luas, peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk pengembangan sekolah ini, telah disusun site plan dengan kebutuhan dana sebesar 120 milyar rupiah, sampai dengan 2012 telah dipenuhi melalui dana APBD sebesar 29,5 milyar rupiah." Selanjutnya kami mengusulkan kekurangannya melalui dana APBN sebesar Rp 90,5 milyar," katanya.

Rudy memberikan gambaran, tingkat pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini adalah, tidak/belum tamat SD 29,9%, SD 31,54%, SLTP 17,96%, SLTA 16,38%, Diploma 1,91% dan S1 2,92%.

Sedang permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di provinsi ini adalah masalah pemerataan, akses dan mutu pendidikan di semua jenjang yang belum optimal, belum optimalnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja.

Selain itu, belum optimalnya kualitas kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan dan belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan, Indeks Pembangunan manusia (IPM) regional Kalsel berada di urutan ke tiga yaitu 69,30 atau urutan ke 26 di seluruh Indonesia. (tt) foto:tt

Perpustakaan Kalsel Kurang Tenaga Pustakawan

Demikian disampaikan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H.M. Hawari saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR, Selasa (1/11) yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Mahyuddin.

Hawari mengatakan, saat ini jumlah pustakawan yang dimiliki Provinsi Kalsel hanya 116 orang. Idealnya, kata Hawari, Pustakawan itu ada di setiap perpustakaan. “Jadi kalau ada 1.561 perpustakaan, pustakawan yang kita butuhkan sejumlah itu,” katanya.

Hawari menambahkan, tenaga Pustakawan ini tentunya sangat diperlukan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang perpustakaan. Karena sebuah perpustakaan memang perlu memiliki orang-orang profesional yang ahli dibidangnya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya telah bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) membuka S1 jurusan Perpustakaan. Selain itu, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan IAIN membuka Diploma 3 Perpustakaan.

Dengan kerja sama ini diharapkan akan semakin banyak pustakawan-pustakawan yang akan tumbuh dari dua perguruan tinggi ini untuk mengisi lowongan yang ada di daerahnya. Hanya saja dia menyampaikan, untuk mengangkat Pustakawan menjadi PNS juga sangat sulit, karena formasi pegawai untuk Pustakawan belum ada.

Hawari menambahkan, dari 1.561 perpustakaan yang ada di di daerahnya menyebar ke seluruh daerah yakni Perpustakaan Daerah Provinsi 1 buah, Perpustakaan Daerah Kab/Kota 13 buah, Perpustakaan Kecamatan Percontohan 6 buah, Perpustakaan Desa/Kelurahan 271 buah, Perpustakaan Sekolah 1.160 buah, Perpustakaan Perguruan Tinggi 55 buah, Perpustakaan khusus (Dinas/Instansi) 25 buah dan Perpustakaan Masjid 30 buah.

Menurut Hawari ada berbagai kendala yang dihadapi terkait dengan perpustakaan di daerahnya diantaranya

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta untuk menambah jumlah tenaga Pustakawan yang ada di daerahnya. Jumlah Pustakawan yang ada sekarang masih sangat sedikit untuk melayani 1.561 perpustakaan yang ada di seluruh Provinsi ini.

masih terbatasnya jangkauan pelayanan perpustakaan sampai ke perdesaan. Selain itu, masih kurangnya koleksi buku-buku yang banyak diminati masyarakat, serta masih rendahnya minat baca di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Hawari mengusulkan untuk mengembangkan Perpustakaan dengan target 150 Buah Perpustakaan Percontohan dan perpustakaan Desa/Kelurahan.

Usulan ini disampaikan dengan maksud dalam rangka pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Ini dilakukan melalui promosi/kampanye Pembudayaan Gemar Membaca dan mengembangkan perpustakaan berbasis teknologi. Di Kalsel saat ini, tambahnya, dari 1.561 perpustakaan, hanya ada enam buah perpustakaan percontohan.

Saat meninjau langsung perpustakaan yang ada di Kalsel, Mahyuddin mengatakan, perpustakaan provinsi yang dilihatnya cukup baik, dengan bangunan, sarana dan prasarana yang memadai.

Menurut Mahyuddin, koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan provinsi ini cukup lengkap, namun yang terpenting pihak perpustakaan harus mampu menarik masyarakat untuk selalu berkunjung ke perpustakaan.

Dengan seringnya masyarakat berkunjung ke perpustakaan, secara tidak langsung sudah menumbuhkan gemar membaca. Selama ini diakuinya, minat baca masyarakat kita relatif masih rendah dan Badan Perpustakaan perlu terus menerus mengkampanyekan budaya membaca ini sampai ke pelosok-pelosok desa. (tt)foto:tt



Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin saat meninjau perpustakaan di Kalimantan Selatan

Komisi VII Usul BUMD Berperan Dalam Pemanfaatan Sektor Energi dan Mineral

Bobby Adhityo Rizaldi Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Pemda Sumbar) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberikan peranan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya sektor energi dan mineral.



Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, Bobby Adhityo

“Dalam rangka meningkatkan PAD Sumbar, saya mengusulkan bagaimana caranya agar BUMD bisa ikut berperan dari sektor kelistrikan,” papar Bobby saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim di Istana Gubernur di Padang Sumatera Barat, beberapa hari lalu. Di Sumatera Barat menurut Bobby

terdapat 45 lokasi yang berpotensi bagi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dan baru 10 lokasi yang sudah dimanfaatkan. Masih ada potensi PLTMH di 35 lokasi.

“Bagaimana caranya agar BUMD diberikan peran dalam perusahaan PLTMH tersebut. Jika BUMD memerlukan riset, DPR bisa minta anggaran pada Dirjen Kelistrikan,” kata politisi dari Partai Golkar.

Selain pada sektor Kelistrikan, Bobby mengusulkan agar BUMD juga diberikan peranan dalam distribusi BBM atau LPG di Sumatera Barat.

“Pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas akan dilakukan pada 2012 melalui pembagian paket tabung gas. Dalam hal ini BUMD bisa dilibatkan dalam distribusi BBM atau LPG.” tambah Bobby. (sc)foto:sc

DPR Akhirnya Setujui RUU BPJS Sebagai UU



Ketua Pansus BPJS Ahmad Nizar Shihab

Setelah perdebatan sengit kapan dimulainya BPJS II antara Pemerintah dan DPR, akhirnya Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengetok palu sebagai bentuk persetujuan DPR terhadap RUU BPJS tersebut. “Apakah semua setuju terhadap RUU BPJS,” tanya Pramono. Kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota dewan yang hadir di Paripurna. Jum’at, (28/10).

Sementara Ketua Pansus BPJS Ahmad Nizar Shihab mengatakan, akhirnya telah terjadi kata sepakat mengenai BPJS I, yang harus bero-

perasi pada 1 Januari 2014.

Dia mengatakan, BPJS II ketenagakerjaan pembentukan badan hukumnya dimulai 1 Januari 2014 sementara pelaksanaannya selambat-lambatnya Juli 2015.

Menteri Keuangan Agus Mar-

towardojo mengatakan, Pada prinsipnya RUU BPJS merupakan landasan hukum yang kokoh bagi seluruh penduduk Indonesia. “Berdasarkan UU diharuskan dibentuk BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Menurutnya, dalam rangka check

and balances terdapat dewan pengawas di kedua BPJS itu. “Proses rekrutment dewan pengawas dari unsur pemerintah dilakukan pemerintah, sementara masyarakat dilakukan oleh kalangan masyarakat,” katanya. (si)/foto:si

5 Fraksi Dukung BPJS II Beroperasi 2014 Mendatang

Terdapat perbedaan pandangan yang tajam antara fraksi-fraksi mengenai pelaksanaan BPJS II. Demokrat, PPP, PKB dan juga pemerintah menghendaki transformasi Jamsostek dilakukan 2016 Namun Golkar, PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura menghendaki BPJS II bisa dilakukan bersamaan dengan BPJS I transformasi Askes pada 2014.

Anggota DPR dari PDIP Surya Chandra Suropaty mengatakan, PDIP menghendaki RUU BPJS bisa disetujui pada hari ini. “persoalannya adalah tentang waktu apakah BPJS II yang mengurus jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun yang juga merupakan transformasi Jamsostek akan beroperasi pada 2014,” kata Surya dihadapan sidang Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Jum’at, (28/10).

Surya menambahkan, pemerintah bersikeras agar BPJS II beroperasi pada tahun 2016. “Apakah bisa diputuskan lewat mekanisme musyawarah mufakat ataupun mekanisme lainnya, namun PDIP menginginkan BPJS II bisa dilaksanakan pada tahun 2014,” paparnya.

Sedangkan PAN mengambil jalan tengah. Fraksi PAN mengusulkan pembentukan badan hukum BPJS II dilakukan 2014 tetapi transformasinya 2016. “Perlu diberikan masa transformasi sebagaimana jamsostek selama 2 tahun setelah 2016 laksanakan fungsi SJSN seutuhnya. beri kebijakan untuk menambah waktu pembahasan RUU,” Kata Hang Ali Saputra Syah Pahan dari PAN.

Sementara Okky Asokawati (F-PPP) mengatakan, sejak awal 2010 RUU ini sudah dibahas artinya sudah 2

tahun dan sekarang mulai mendekati tahap akhir BPJS. “Fraksi PPP meminta sidang segera menetapkan BPJS I dan BPJS II pada tahun 2014 setelah disetujui pemerintah harus menyusun transformasi terkait pembentukan BPJS itu,” katanya.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Fraksi PKB Chusnunia, Dia

mengatakan, pembahasan RUU ini meskipun secara tentatif sudah cukup mengingat bobot karena masih ada yang belum terselesaikan masih butuh waktu lagi di bahas. “berkenaan BPJS I dan II Fraksi PKB memberikan usulan BPJS Kesehatan tahun 2014 dan untuk BPJS pensiun bisa berjalan 2016,” paparnya. (si)/foto:iw/parle.



Anggota DPR RI Surya Chandra Suropaty (F-PPDIP)

Komisi X Minta Kalsel Jadikan Sungai Sebagai Destinasi Wisata Utama

Komisi X DPR RI meminta Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadikan sungai sebagai destinasi wisata utama di kawasan Kalimantan Selatan.



Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah

Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR Hetifah saat pertemuan dengan Gubernur Kalsel dan jajarannya dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi X ke Provinsi tersebut, Senin (31/10) yang dipimpin Wakil Ketua Asman Abnur.

Hetifah memprihatinkan sudah sejak lama peradaban sungai di Indonesia sangat diabaikan, padahal sebetulnya budaya Asia mulainya dari sungai. Dia mencontohkan, seperti negara China sangat pandai memanfaatkan sungai menjadi destinasi wisata utama, demikian juga dengan Singapura.

Namun sangat disayangkan, jika melihat sungai di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan daerah-daerah lainnya dia melihat sungai itu hanya sebagai tempat pembuangan, tempat polusi bukan sebagai water front city seperti dinegara negara lain.

Untuk itu, Hetifah meminta tahun 2012 Dinas Pariwisata setempat mengembangkan destinasi dan budaya

yang berbasiskan sungai menjadi prioritas.

Sementara itu, Anggota Komisi X lainnya Itet Tridjati Sumariyanto membenarkan Dinas Pariwisata kurang memanfaatkan sungai menjadi tujuan utama wisata daerahnya. Menurut Itet, wisata sungai di Kalsel ini banyak yang bisa dipromosikan, seperti adanya pasar terapung. Hanya saja sayangnya, pasar terapung yang dia lihat tidak punya nilai jual yang tinggi sebagai kawasan pariwisata unggulan.

Itet mencontohkan, kapal-kapal yang dipakai penjual di pasar terapung sangat tidak menarik, sudah jelek dan tidak ada daya tariknya. Seharusnya Pemda setempat membantu meremajakan kapal-kapal tersebut sehingga menjadi kapal yang indah dan sangat diminati bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Itet kembali mencontohkan, seperti di Thailand, wisata sungainya sangat menarik dengan sarana perahu yang indah

siap membawa wisatawan berkeliling sungai. Ternyata, kata Itet, wisata sungai di negara ini dapat menarik banyak wisatawan untuk menikmati pemandangan di sekitar sungai.

Sebetulnya, tambahnya, jika wisata sungai ini digarap lebih serius, dia yakin potensi sungai yang ada di Indonesia tidak kalah menariknya dibandingkan dengan negara-negara lain.

Untuk menambah kawasan sungai tersebut menjadi kawasan yang menarik, Itet juga mengusulkan agar dibuatkan tempat persinggahan, dimana di tempat tersebut dapat dibuat kios-kios souvenir yang menjual oleh-oleh khas Kalimantan Selatan yang terkenal dengan batu-batuanya dan kain Sasirangan.

Itet juga meminta Dinas Pariwisata Kalsel untuk lebih gencar lagi mempromosikan daerahnya menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia. "Saya menilai gaung pariwisata di daerah ini masih kurang, seharusnya Dinas Pariwisata setempat lebih aktif memberikan informasi daerahnya," kata politisi F PDI Perjuangan ini.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Mohandas S. mengatakan, terkait wisata sungai ini, pihaknya telah mengusulkan peningkatan kualitas destinasi dalam Wilayah Kota Banjarmasin (Budaya Pasar Terapung) agar tidak punah. Usulan ini telah masuk dalam RIPPNAS.

Dinas Pariwisata juga telah mengusulkan untuk peningkatan kualitas destinasi dalam Wilayah Pengembangan Strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berupa Objek Kawasan Wisata Loksado.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pengembangan baru obyek wisata yaitu obyek wisata terumbu karang Pantai Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Teluk Tamiyang di Kabupaten Kotabaru dan pengembangan obyek wisata Atraksi Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (tt)foto:tt

Dukungan Pembentukan Pansus Papua Mengerucut

Dukungan Pembentukan Pansus Papua semakin mengerucut, Anggota DPR Diaz Gwijangge dari Partai Demokrat mendesak DPR RI segera membentuk Pansus Papua yang bertujuan menuntaskan persoalan Papua secara komprehensif.



Anggota DPR RI Diaz Gwijangge (F-Demokrat)

“Perlu desakan dan sikap resmi lembaga untuk segera membentuk pansus Papua dan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh,” jelas Diaz saat interupsi pada rapat paripurna, Jum’at, (28/10).

Menurutnya, Pansus harus turun langsung ke Papua dengan menuntaskan persoalan disana. “saya minta persoalan Papua tidak mengedepankan persoalan militer tetapi melalui dialog yang bermartabat di tanah Papua,” paparnya.

Sebelumnya, anggota DPR Imam Suroso (F-PDIP) meminta DPR RI segera membentuk Pansus Papua. “peristiwa pembunuhan Kapolsek Papua dapat menjadi preseden buruk bagi NKRI. kita meminta Pimpinan DPR RI membuat pansus buat Papua,” terangnya.

Dia menambahkan, Pemerintah SBY melalui Kapolri, Panglima TNI harus menegakkan hukum dan melindungi warga negaranya. “Kasihlah sekali rakyat Papua sering menanggung akibat penembakan gelap itu,” paparnya. (si)foto:si

Komisi VII DPR RI Minta Sumber Energi Lokal Dimanfaatkan Optimal



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Azwir Dainitara (tengah)

Tantangan yang kita hadapi di sektor energi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri yang meningkat cepat. Menghadapi kondisi demikian, upaya yang mesti dilakukan adalah mengutamakan pemanfaatan sumber energi lokal secara optimal bagi peningkatan dan pemerataan kemampuan supply energi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI (Tim Kunker) ke Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Azwir Dainitara saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim di ruang rapat Istana Gu-

bernan Sumbar, Padang, beberapa hari lalu.

Azwir mengatakan, kemampuan supply tersebut tidak hanya dari sisi pasokan, namun juga dari sisi infrastruktur untuk pendistribusian energi.

Dengan adanya potensi air yang cukup besar di Sumbar, menurut Azwir pemanfaatan potensi air merupakan suatu langkah yang tepat dan perlu terus ditingkatkan kapasitasnya.

“Berdasarkan data yang ada pada kami, potensi tenaga air di Sumbar diperkirakan dapat mencapai 1200 MW namun baru dimanfaatkan sekitar 40%,” ujar politisi dari Fraksi Golkar ini.

“Kami juga terus memonitor pembangunan PLTU berkapasitas 2x112 MW di wilayah Teluk Sirih Sumbar, yang merupakan bagian dari program pembangunan PLTU 10.000 MW Tahap I,” tambahnya.

Pembangunan PLTU Teluk Sirih menurutnya sangat strategis, mengingat kemampuan produksi listrik dari PLTA maupun PLTM yang ada saat ini di Sumbar berada jauh dibawah kapasitas terpasangnya akibat penurunan debit air terutama di musim kemarau.

“Upaya-upaya seperti ini patut didukung dalam rangka percepatan pemerataan akses masyarakat terhadap energi,” papar Azwir. (sc) foto:sc

Komisi IV DPR Minta RTRW Kabupaten Raja Ampat Dibenahi

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah daerah provinsi Papua Barat dan Pemkab Raja Ampat segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah – Provinsi (RTRW-P) Papua Barat, mengingat banyak yang menyalahi peruntukan. Sebagaimana diketahui 80% wilayah Kab. Raja Ampat adalah berupa hutan lindung dan kawasan konservasi perairan dan kelautan yang diakui secara internasional.



Komisi IV DPR saat Kunjungan Kerja ke Raja Ampat Papua Barat

Hal itu dikemukakan ketua tim Komisi IV DPR RI, E. Herman Khairon saat pertemuan dengan Bupati Raja Ampat beserta jajarannya yang berlangsung di kantor Bupati Raja Ampat (1/11).

Herman Khaeron mengatakan, banyak bangunan milik pemerintah daerah, kantor-kantor dinas kabupaten dan kawasan perumahan milik pemerintah daerah dan DPRD Kab. Raja Ampat berdiri di atas lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan lahan konservasi. “Situasi keterlanjutan ini kan perlu diselesaikan, jangan sampai pembangunan menyalahi aturan dan menabrak RTRW,” ujar Herman

saat memberi sambutan. Kepada pihak Pemprov Papua Barat dan Pemkab. Raja Ampat serta Kementerian Kehutanan, Herman sudah mengingatkan untuk mengatur kembali RTRW-P, apakah masih memungkinkan perubahan status atau alih fungsi untuk kepentingan pemda dan rakyat. “Mempertahankan lahan untuk hutan lindung dan konservasi itu penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kesejahteraan rakyat,” tukasnya menegaskan.

Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad dalam keterangannya mengatakan, Kab. Raja

Ampat di Papua Barat masuk dalam tiga zona penting konservasi dunia setelah dikukuhkannya sebagai salah satu wilayah segitiga terumbu karang dunia atau “World Coral Triangle”, disamping hutan Amazon di Brazil, dan konservasi flora dan fauna di Kongo Afrika Barat. “Presiden RI saat konferensi di Rio de Janeiro, menegaskan komitmen Indonesia untuk mengkonservasi 20 juta hektar laut kita pada tahun 2020, termasuk di dalamnya kawasan perairan Raja Ampat,” ungkapnya.

Usai pertemuan dengan Bupati Raja Ampat Drs. Marcus Wanma, M.Si, rombongan tim Komisi IV DPR RI melanjutkan peninjauan ke kampung wisata Arborek, distrik Meos Mansar Kep. Raja Ampat yang berjarak 2 jam perjalanan dengan speedboat dari ibukota kabupaten, untuk melihat dari dekat pelaksanaan program Cormep II, yakni program konservasi sumberdaya laut yang melibatkan masyarakat Raja Ampat. Turut serta pada kunjungan kerja kali ini, anggota Komisi IV DPR RI Hj. Iti Octavia Jayabaya, Sri Hidayati, dan Anton Sukartono Suratno (F-PD), Robert Joppy Kardinal, Adi Sukemi, dan Capt. Anthon Sihombing (F-PG), I Made Urip dan Honing Sanny (F-PDIP), H. Ma'mur Hasanudin (F-PKS), Peggy Patricia Patipati (F-PKB), dan HA. Murady Dharmansyah (F-Hanura). (Iq.Tvp)foto:tim parle

Ruang Biologis Rutan Polda Sumut Dipertanyakan

“Ruang biologis ini bisa mengundang orang semakin banyak masuk tahanan, ini soal yang selalu menimbulkan perbedaan pendapat apakah pantas?” tanya anggota Komisi III Martin Hutabarat saat pertemuan dengan Kapolda Sumut dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (1/11/11).

Dalam rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Polda Sumut itu, anggota komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsy juga mempertanyakan keamanan di Ruang Tahanan Polisi (RTP) Polda Sumut. Ia mendapat informasi seorang tahanan bernama Gindo Hasibuan meninggal di kamar mandi RTP. “Kenapa ini bisa terjadi?” ujarnya.

Menjawab hal ini Kapolda Sumut Irjen Wisjnu Amat Sastro menjelaskan kebijakan menyediakan ruang biologis bagi para tahanan semata-mata memperhatikan masalah HAM. Apalagi hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemkumham menemukan 70 persen tahanan cenderung melakukan tindakan yang dilarang karena kebutuhan seks mereka terhambat. “Ini kebijakan yang baru berjalan 3 bulan yang sebelumnya telah dikonsultasikan dengan tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Kita akan evaluasi apabila ternyata lebih banyak jeleknya, kita akan tutup,” kata Kapolda.

Sementara terkait meninggalnya tahanan Gindo Hasibuan, ia menyebut akibat penyakit jantung yang dideritanya. Hasil visum tersangka korupsi ini ditemukan indikasi penebalan di jantungnya serta tidak ada tanda-tanda kekerasan. Polda Sumut menurutnya telah menjelaskan kepada pihak keluarga dan sejauh ini tidak ada keberatan.

Tinjau Polisi Air di Belawan

Dalam kunjungan ke markas Direktorat Polisi Air Polda Sumut di kawasan pelabuhan Belawan, anggota Komisi

Kebijakan Kapolda Sumut untuk menyediakan ruang biologis bagi para tahanan mendapat sorotan anggota Komisi III DPR RI. Apabila tidak diterapkan dengan hati-hati kebijakan tersebut dinilai akan membawa dampak negatif, seperti penjara dianggap bukan lagi dianggap sebagai tempat orang yang dihukum sehingga upaya memberikan efek jera menjadi tidak efektif.



Tim Komisi III DPR saat Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara

III mendapat penjelasan minimnya sarana pendukung patroli untuk mengatasi tindakan kejahatan di laut seperti illegal fishing dan penyeludupan. “Kita perlu mendukung pengadaan armada kapal patroli yang saya nilai masih jauh dari memadai. Tapi itu baru dapat kita perjuangkan dalam pembahasan APBN-P nanti,” kata anggota Komisi III dari Fraksi PKS Nasir Jamil, usai mendengar paparan Direktur Ditpolair Polda Sumut, Kombes Ario Gatut Kristianto.

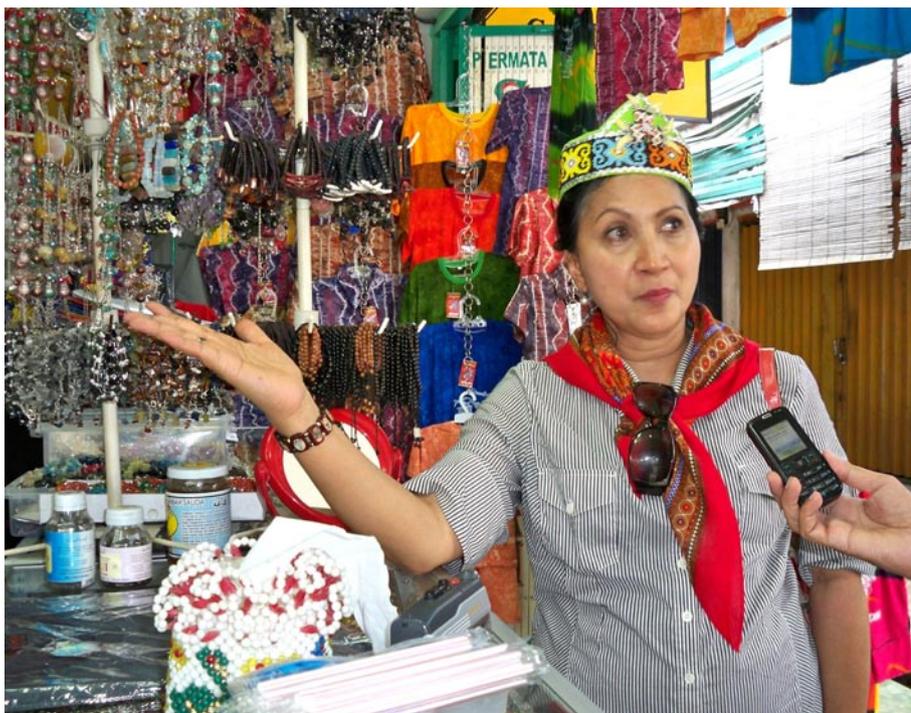
Menurut Ario setidaknya ada tiga tantangan Polair dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan di perairan

yaitu, kondisi wilayah yang luas, pantai yang terbuka lebar, serta terbatasnya sarana pendukung dan SDM. “Kita masih mengoperasikan kapal patroli kayu yang tentu kalah cepat dengan kapal penjahat,” tandasnya.

Masalah lain adalah belum tuntasnya batas wilayah di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Yang terkena dampaknya adalah nelayan Indonesia, mereka ditangkap karena didakwa beroperasi di wilayah laut Malaysia. Peralatan dan ikan hasil tangkapan mereka disita, kondisi yang jelas memberatkan mereka. (iky) foto: iky

Komisi X Minta Dinas Pariwisata Kalsel Bantu Tingkatkan Kreasi Pengrajin

Komisi X DPR RI meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membantu meningkatkan daya kreasi para pengrajin asesoris di Martapura. Menurut salah seorang anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumariyanto, Dinas Pariwisata setempat perlu mendatangkan designer agar dapat memberikan pengetahuan untuk dapat menciptakan desain-desain yang indah.



Salah satu tempat yang menjual asesoris dan kerajinan tangan di Martapura, Kalimantan Selatan

Demikian disampaikan saat Komisi X DPR mengunjungi tempat souvenir terkenal di Martapura “Cahaya Bumi Selamat” dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi X ke Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (1/11).

Cahaya Bumi Selamat ini merupakan kawasan belanja terkenal di daerah ini untuk mendapatkan berbagai cinderamata khas daerah Kalimantan Selatan seperti perhiasan dari batu, kain khas Kalsel Sasirangan, lampit, makanan khas daerah ini, bahkan sampai berlian bisa didapatkan di sini.

Dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Mahyuddin, Itet

yang dijadikan perhiasan di daerah ini sangat luar biasa. Namun hendaknya pemerintah setempat memberikan perhatian serius untuk lebih memajukan para pengrajin itu menciptakan berbagai macam kreasi.

Menurut Itet, jika seseorang memakai gelang dari batu, tidak hanya sekedar memakai saja, tapi harus ada sentuhan seninya sehingga dapat menciptakan karya seni yang indah. Itet melihat model-model perhiasan yang dijual di sana modelnya masih monoton, tidak banyak perubahan model yang dilakukan para pengrajin itu.

“Jika Dinas Pariwisata setempat mengundang designer perhiasan untuk memberikan pengetahuan bagi

pengrajin itu saya yakin karya yang dihasilkan para pengrajin itu jauh lebih bagus dan lebih menarik,” katanya.

Perbaikan desain ini menurut Itet sangat penting, karena jangan sampai wisatawan tertarik hanya membeli batu-batuannya saja, dan untuk urusan model dibawa kenegaranya untuk dibuat di sana.

Nilai tambah ini juga perlu didorong terus, bahwa wisatawan itu tidak hanya sekedar membeli batu, tapi membeli sesuatu yang indah untuk dikenakan. Disinilah Sumber daya manusianya yang harus ditingkatkan dari segala level, dari pendidikan formal, pendidikan kreatif, dan itu yang harus diutamakan.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalsel Mohandas S. menyampaikan banyak permasalahan yang dihadapi terkait pariwisata di daerahnya diantaranya, aspek kebudayaan sampai saat ini masih lebih menonjolkan kepada pemanfaatan dan pengembangan budaya untuk kepariwisataan sementara pembinaan yang menyentuh kepada pembangunan penguatan jati diri dan karakter bangsa (Character building) belum optimal dilakukan.

Selain itu, kualitas SDM seni dan budaya serta kepariwisataan belum menerapkan prinsip-prinsip sapta persona dengan baik.

Pihaknya, kata Mohandas, telah mengusulkan kepada Pemda untuk meningkatkan kualitas Destinasi dalam Wilayah Banjarbaru dan Martapura berupa peningkatan objek wisata Pendulangan Intan dan Pasar batu Permata, serta Pembangunan Gedung Taman Permata.

Untuk itu dia mengusulkan dukungan anggaran pada Pemerintah Pusat untuk kegiatan yang dapat menunjang peningkatan SDM guna pengembangan Seni dan Budaya di Daerah. Selain itu juga untuk membiayai pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Situs, Kawasan Cagar Budaya dan Museum. (tt)foto:tt

DPR Tuntaskan Delapan RUU Pada Masa Sidang I

DPR telah menuntaskan 8 RUU pada masa sidang I tahun sidang 2011-2012 ini.



Ketua DPR RI, Marzuki Alié

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua DPR Marzuki Alié dalam naskah pidato penutupan Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara III, Jum'at, (28/10).

Menurut Marzuki, RUU tersebut diantaranya RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, RUU tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Bantuan hukum, RUU tentang intelijen Negara, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), dan RUU tentang Pengelolaan Zakat.

Menurutnya, tiga RUU kumulatif terbuka juga telah diselesaikan, diantaranya RUU APBN 2012. Sementara tiga belas RUU Prioritas 2011 yang telah masuk pembicaraan tingkat I antara lain RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, RUU tentang perubahan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan lain-lain. (si) foto: si/parle

Peralatan e-KTP di Solo Masih Kurang

Ketua Tim Komisi II DPR yang juga Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo mengatakan, semestinya pemerintah pusat menyediakan 29 set alat. Namun saat ini yang diterima oleh Pemkothanya 10 set. Pihak Pemkot menginformasikan, dari 10 set peralatan yang diterima ternyata tidak bisa dioperasikan semuanya, karena ada beberapa yang rusak, jadi dalam pengoperasiannya terkadang beberapa alat harus dikembalikan.

Wakil Walikota Surakarta FX Hadi Rudyanto kepada tim Komisi II mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pemerintah pusat. Hal senada dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Mamik. Dia akui mesin e-KTP banyak yang rusak hingga sering dilakukan kanibalisasi.

Kini yang ditakuti adalah target penyelesaian yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu pada Desember tidak dapat dipenuhi, karena

Dalam kunjungan kerja ke Kota Surakarta (Solo), provinsi Jawa Tengah, Komisi II DPR RI menemukan adanya kekurangan peralatan untuk mengoperasikan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) Selasa (1/11).

na seluruh mesinnya belum sampai. Seperti diketahui, pelaksanaan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2011.

Komisi II DPR mengakui bahwa animo masyarakat cukup bagus untuk mendaftar e-KTP, namun akhirnya pengerjaan harus sebatas undangan karena keterbatasan alat. Melihat kondisi tersebut, pihak Kementerian Dalam Negeri yang turut mendampingi Komisi II dalam kunjungan kerja kali ini menyatakan, Kemendagri segera mengirimkan sisa alat pada tanggal 12 November 2011.

Selain mengunjungi Surakarta, Komisi II juga melanjutkan kunjungan kerja ke kota Salatiga, Jawa Tengah untuk memantau pelaksanaan e-KTP di daerah tersebut. (Rd.TvP) foto: parle



Ketua Tim Komisi II DPR, Ganjar Pranowo



**Keluarga Besar
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Mengucapkan Selamat
idul adha**

1432 H

Mohon Maaf Lahir dan Bathin